



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SULISTYO YULI UTOMO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **210571**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/126 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/126 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 71 m2 di KOTA SEMARANG , LAINNYA Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 84 m2 di KOTA SEMARANG , LAINNYA Rp. 400.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/70 m2 di KOTA SEMARANG , LAINNYA Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 47.000.000

1. MOBIL, HONDA CITY GD 8 1.5 I-DSI MT (S) Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 47.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 77.423.934**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.774.423.934

III. HUTANG Rp. 500.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.274.423.934

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.